



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI AD YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUSILA
DI LINGKUNGAN TNI**

**(Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung
Nomor : 10-K/BDG/PMT-II/AD/I/2014)**

TESIS

GHESA KHIASTRA

1210922007

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
TAHUN 2014**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI AD YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUSILA
DI LINGKUNGAN TNI**

**(Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung
Nomor : 10-K/BDG/PMT-II/AD/I/2014)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

GHESA KHIASTRA

1210922007

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
TAHUN 2014**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Nama : Ghesa Khiastra, S.S.T.Han., S.IP.

NRP : 121.0922.007

Program Studi : Magister Ilmu Hukum.

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, 09 Juli 2014

A handwritten signature in black ink is written over a green and white 6000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', 'PAJAK NEGARA', 'TGL. 20', '93462ACF08261974', 'ENAM RIBU RUPAH', and 'DJP'.

Ghesa Khiastra, S.S.T.Han., S.IP
NRP 121.0922.007

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UPN “ Veteran “ Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ghesa Khiastra, S.S.T.Han., S. IP.

NRP : 121.0922.007

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Pidana

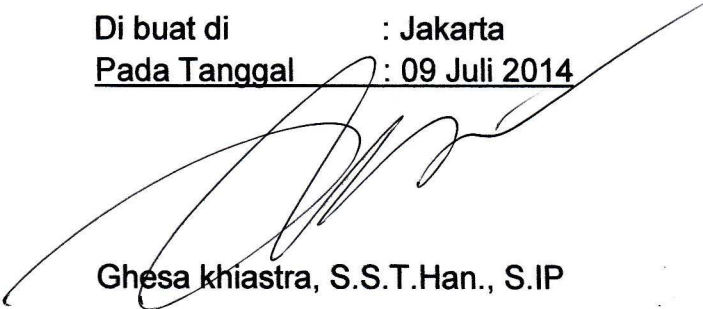
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPN “ Veteran “ Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah saya berjudul “ **Penerapan Hukum Terhadap Anggota TNI AD Yang Melakukan Tindak Pidana Susila di Lingkungan TNI (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 10-K/BDG/PMT-II/AD/II/2104) “**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non Eksklusif ini, UON “ Veteran “ Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis/Pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Di buat di : Jakarta
Pada Tanggal : 09 Juli 2014



Ghesa khiastra, S.S.T.Han., S.IP



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan penguji Program Pascasarjana Magister Hukum UPN "Veteran" Jakarta.

Jakarta, 09 Juli 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum.

Dr. H. Mohammad Hatta, S.H, M.Kn.

Ketua Program

Dr. Erni Agustina, SH., Sp.N

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Ghesa Khiastra, S.S.T.Han., S.IP.

NRP : 121.0922.007

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judu Tesis : PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI AD YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUSILA DI LINGKUNGAN TNI (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 10-K/BDG/PMT-II/AD/I/2014)

Telah berhasil dipertahankan dalam pengujian dihadapan Dewan Penguji Program Pascasarjana UPN "Veteran" Jakarta

Pada Tanggal : 09 Juli 2014





Dewan Penguji :

1. Dr. Erni Agustina, S.H., Sp. N

2. Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M. Hum.

3. Dr. Mohammad Hatta, S.H., M.Kn.

4. Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, S.H., M.H.





()
()
()
()

REVISI HASIL SEMINAR SIDANG KOMPREHENSIF/TESIS

Nama : Ghesa Khiastra, S.S.T.Han., S.IP.
NRP : 121.0922.007
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

- I. Judul Tesis : Penerapan Hukum Terhadap Anggota TNI AD Yang Melakukan Tindak Pidana Susila di Lingkungan TNI (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 10-K/BDG/PMT-II/AD/II/2104).
- II. Substansi/Teori : -
- III. Teknik Penulisan : Perbaikan Teknik Penulisan

TIM PENGUJI

No	Dosen Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Erni agustina, SH., Sp.N	Ketua Penguji	
2	Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum.	Penguji Tesis	
3	Dr. Mohammad Hatta, SH., M.Kn	Penguji Tesis	
4	Prof. Dr. Bambang Widodo Umar SH.,MH	Penguji Ahli	

Telah Direvisi :

Penguji


:

Jakarta, 18 Juli 2014

Penguji


:

Penguji


:

penguji


:

Mengetahui,
Ketua Program

Acc

Kaprodi

Tanggal


:

: 18 Juli 2014


Dr. Erni Agustina, SH., Sp.N

ABSTRAK

Ghesa Khiastra. 2014. Penerapan Hukum Terhadap Anggota TNI AD Yang Melakukan Tindak Pidana Susila di Lingkungan TNI (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 10-K/BDG/PMT-II/AD/L/2014).

Pembimbing : I. Dr. M. Ali Zaidan, S.H.,M.Hum.,
II. Dr. H. Mohammad Hatta, S.H, M.Kn

Kata kunci : Tindak Pidana Susila, Prajurit TNI.

Era globalisasi dan teknologi telah mengubah gaya hidup, trend serta cara pandang baru bagi pergaulan para remaja saat ini. Persetubuhan yang dilakukan seorang Anggota Kowad TNI AD dengan sesama anggota TNI AD yang keduanya adalah gadis dengan bujang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Obyek penelitian ini adalah apakah penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana susila berdasarkan putusan Hakim Mahkamah Agung nomor putusan 10-K/BDG/PMT-II/AD/I/2014 dalam lingkungan militer serta penjatuhan sanksinya sudah memadai serta bagaimana bila ditinjau dari PP no.39 tahun 2010 ? Sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis normative ini hasil penelitian dari segi Undang-undang berupa data dan diyakini belum dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang dibahas, dan diolah, yang kemudian dipadukan dengan yang didapat dari hasil dan kepustakaan yang tujuannya mendapatkan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan. Hasil analisis yang didapat adalah bahwa penerapan pidana belum memadai karena belum ada hakim yang menjatuhkan pidana maksimal sesuai yang diatur dalam pasal 281 dan ditinjau berdasarkan PP no.39 tahun 2010, Komandan satuan berwenang menjatuhkan PDTH kepada terdakwa apabila perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma – norma keprajuritan dan tidak layak untuk dipertahankan dalam TNI AD. Kesimpulan dan saran yang di dapat dari hasil analisis adalah, bahwa seharusnya penerapan pidana susila harus dijatuhkan dengan pidana maksimal sesuai dengan pasal 281 KUHP dan bagi prajurit yang melanggar dikenakan PDTH karena perbuatan susila tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak susila dan dilakukan penyuluhan hukum secara berkala di satuan – satuan oleh Komandan maupun perwira hukum untuk mengurangi kasus susila yang dilakukan prajurit TNI AD.

ABSTRACT

Ghesa Khiastra. 2014 Application of the Law Against Army Members Engaging in Environmental Crime Susila TNI (Juridical Analysis Against Supreme Court Number: 10-K / BDG / PMT-II / AD / L / 2014).

Advisor : I Dr. M. Ali Zaidan, S.H., Hum. ,
II. Dr. H. Mohammad Hatta, SH, M.Kn

Keywords : *Crime Susila, Indonesian Armed Forces.*

The era of globalization and technology have changed the life style, trends and new perspectives for the association of the teenagers today. Intercourse is what an Army Kowad Member with fellow members of the Army who are both with the servant girl was not stipulated in the Penal Law (Penal Code). Object of this study is whether the application of the criminal law for moral decision based on the number of Judges of the Supreme Court ruling : 10-K / BDG / PMT-II / AD / I / 2014 in a military environment as well as the imposition of sanctions is sufficient and how when the review of Regulation no. 39 of 2010? While the methods used is this normative juridical research results in terms of the Act in the form of data and is believed to have not been able to provide solutions to the issues discussed, and processed, which is then combined with the results obtained from the interviews and the literature that aim to get answers issues that have been raised . The results of the analysis were that the application of the criminal is not sufficient because there is no judge who dropped the maximum criminal process outlined in article 281 and reviewed under Regulation no. 39 of 2010, the unit commander authorized to impose PDTH to the defendant if the defendant's actions do not fit the norm soldiering and not worthy to be retained in the Army. Conclusions and suggestions obtained from the results of the analysis is, that the application should be dropped moral crime with a maximum punishment in accordance with Article 281 of the Criminal Code and for the soldiers who violate decency imposed PDTH unworthy deeds done by a soldier of the army to provide a deterrent effect for perpetrator acts of moral and legal counseling is done on a regular basis in the unit commander or officer by law to reduce the moral case made Army soldier.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahNya yang hanya dengan perkenanNya jugalah akhirnya penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Demikian pula shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia menuju ke jalan kebenaran yang diridhoinya.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua Orang Tua penulis yaitu Ayahanda Faisal, S.E. dan Ibunda Dini Ramadhan yang dengan keringat dan kerja keras mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan penuh perjuangan dan kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas tercinta ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis yang sederhana ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis sampaikan sebesar-besarnya rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE, MM selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Ibu Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N selaku Ketua Program Magister hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;

3. Bapak Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan laporan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik;
4. Bapak Dr. Moh. Hatta, SH, Mkn selaku selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan laporan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
6. Kepala dan staf Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang telah berkenan memberikan ijin dan mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini.
7. Ayahanda terhormat dan Ibunda tercinta serta adikku yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
8. Pendamping hidupku, Indri Firmanita Dewi dan adik - adikku tercinta, Nabila Fani dan Desifa Hani Bersama kalian hidup menjadi lebih hidup;
9. Teman-teman seperjuangan seluruh Mahasiswa/i angkatan VI; Pamasis STHM Angkatan XVII, dan rekan-rekan Pandu Rilastaka yang penulis cintai dan banggakan, serta para pihak yang tidak penulis tuliskan namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih serta penghargaan setinggi-tingginya terhadap semua kontribusi yang diberikan.

Peneliti hanya dapat memanjatkan doa semoga kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini. Amin.

Jakarta, 09 Juli 2014

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ghesa Khiastra', written in a cursive style.

Ghesa Khiastra, S.S.T.Han., S.IP.

NRP 121.0922.007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN PENGUJI	vi
LEMBAR REVISI SIDANG TESIS.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Kegunaan Penelitian	21
E. Metode Penelitian	21
1. Tipe Penelitian	21
2. Sifat Penelitian	22
3. Sumber Data	22
4. Pengumpulan Data	23
5. Analisis Data	24

6. Cara Pengambilan Kesimpulan	24
F. Kerangka Konseptual	25
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Landasan Teori	32
1. Teori Pidana	32
B. Pengertian Tindak Pidana.....	34
1. Unsur – unsur tindak pidana	39
2. Unsur – unsur perbuatan pidana yang disepakati	43
3. Unsur – unsur perbuatan pidana yang tidak disepakati	50
4. Syarat Melawan Hukum	53
5. Kesalahan	55
6. Percobaan	58
7. Penyertaan	62
8. Gabungan Tindak Pidana	69
C. Pengertian Susila	70
D. Pengadilan Militer	74
1. Sistem Peradilan Militer di Indonesia	75
E. Tindak Pidana Militer	86
1. Pidana Tambahan Pemecatan	88
2. Sistem Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer	89
3. Upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan	

Grasi	91
4. Jenis dan Bentuk Pidana/Penjatuhan Pidana Pada Peradilan Militer	93
5. Cara Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer	96
6. Beberapa Tekhnis Penilaian Tentang Tidak Layaknya Terdakwa Dipertahankan Sebagai Seorang Militer	100
7. Beberapa Kendala/Hambatan Dalam Musyawarah Sehubungan Dengan Penjatuhan Pemecatan	101
8. Beberapa Pemikiran Tentang Sistem Penjatuhan Pidana Pemecatan Yang Ideal	101
BAB III TINJAUAN YURIDIS	106
A. Tindak Pidana Susila ditinjau dari KUHP	106
B. Tindak Pidana Susila ditinjau dari KUHPM.....	113
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	126
A. Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Susila di Lingkungan Militer	126
B. Pemberian Hukuman Terhadap Tindak Pidana Asusila Ditinjau Berdasarkan Pp Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI	128
C. Pembahasan Terhadap Putusan	131
1. Kasus Posisi	131
2. Dakwaan dan Tuntutan	132

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	145

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN